

DESENTRALISASI FISKAL DAN STABILITAS MAKROEKONOMI: STUDI KASUS DI INDONESIA

FISCAL DECENTRALIZATION AND MACROECONOMIC STABILITY: THE CASE IN INDONESIA

Rasbin

(Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Nusantara II, Lantai 2, DPR RI
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia;
email: ras9bin@yahoo.co.id)

Naskah Diterima: 20 Januari 2016, direvisi: 15 Maret 2016,
disetujui: 31 Maret 2016

Abstract

Implementation of fiscal decentralization in Indonesia has been more than a decade. The benefit of fiscal decentralization should be known clearly. Research on the impact of fiscal decentralization to macroeconomic stability are generally inconclusive. This study is aimed to analyze the impact of fiscal decentralization on macroeconomic stability in Indonesia. To reach the goals, this study used fixed effect panel method. The analysis is based on the time series annual data covering the period 2009 – 2013 toward 33 province in Indonesia. Based on the descriptive analysis of macroeconomic stability variables showed in 2013, most major MI index is Banten Province while the lowest is in West Sulawesi Province. Based on that index, province of Banten is a province that has a macroeconomic instability are the highest, while the high level of macroeconomic stability that occurs in West Sulawesi. In addition, the study also found evidence that fiscal decentralization positive impact on macroeconomic stability but not significant. Indications of this finding is that the relationship between fiscal decentralization and macroeconomic stability did not show a strong relationship.

Keywords: *fiscal decentralization, revenue decentralization, expenditure decentralization, macroeconomic stability, misery index*

Abstrak

Implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia sudah lebih dari satu dekade. Manfaat pelaksanaan desentralisasi fiskal tersebut harus bisa diketahui secara jelas. Studi-studi tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap stabilitas makroekonomi secara umum masih belum mendapatkan kesimpulan yang konklusif. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap stabilitas makroekonomi di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, tulisan ini menggunakan metode estimasi panel *fixed effect*. Analisis didasarkan pada data time series tahunan yang mencakup periode waktu 2009 – 2013 terhadap 33 provinsi di Indonesia. Berdasarkan analisis deskriptif terhadap variabel stabilitas makroekonomi menunjukkan bahwa pada tahun 2013, indeks MI paling besar adalah Provinsi Banten sedangkan indeks MI paling rendah adalah Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan indeks tersebut, Provinsi Banten merupakan provinsi yang memiliki ketidakstabilan makroekonomi yang paling tinggi sedangkan tingkat kestabilan makroekonomi yang tinggi terjadi di Provinsi Sulawesi Barat. Studi ini juga menemukan bukti bahwa desentralisasi fiskal berdampak positif terhadap stabilitas makroekonomi tapi tidak signifikan. Artinya hubungan antara desentralisasi fiskal dan stabilitas makroekonomi tidak menunjukkan hubungan yang kuat.

Kata kunci: desentralisasi fiskal, desentralisasi penerimaan, desentralisasi pengeluaran, stabilitas makroekonomi, misery index

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa Orde Reformasi, Pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu kebijakan yang dinamakan dengan desentralisasi atau otonomi daerah dalam bidang fiskal atau sering disebut juga dengan Kebijakan Desentralisasi Fiskal. Kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Fiskal dan Daerah. Dalam pelaksanaannya kedua UU tersebut baru berjalan efektif pada bulan Januari 2001. Namun, belum genap berjalan 5 (lima) tahun, tepatnya tahun 2004, kedua UU tersebut mengalami

amandemen. UU No. 22 Tahun 1999 diamandemen oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah sedangkan UU No. 25 Tahun 1999 diamandemen oleh UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dalam pelaksanaannya, kedua UU ini didukung oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan, dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah yang kemudian diamandemen oleh PP Nomor 78 Tahun 2007.

Kebijakan desentralisasi fiskal tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen kebijakan yang efektif untuk membantu perkembangan

pertumbuhan ekonomi¹ terutama perekonomian daerah. Karena salah satu tujuan dikeluarkannya kebijakan desentralisasi fiskal adalah mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical fiscal imbalance*) dan antar daerah (*horizontal fiscal imbalance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketimpangan ini dapat diukur dari deviasi antara produk domestik regional bruto (PDRB) baik nominal maupun per kapita setiap daerah dibandingkan dengan rata-rata nasional. Semakin kecil *gap* tersebut maka semakin berhasil pelaksanaan desentralisasi fiskal.²

Selain itu, desentralisasi fiskal juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah. Oleh karena itu, pemberlakuan desentralisasi fiskal diharapkan dapat menjadikan tata kelola keuangan menjadi transparan dan akuntabel sehingga kegiatan pengalokasian transfer ke daerah menjadi tepat sasaran, tepat waktu, efisien dan adil.³

Salah satu kesuksesan desentralisasi fiskal adalah desentralisasi fiskal dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya desentralisasi fiskal dapat memperbesar pertumbuhan ekonomi secara langsung dengan meningkatnya efisiensi pengeluaran publik dan secara tidak langsung melalui peningkatan efisiensi ekonomi, menciptakan keseimbangan horizontal vertikal dan dengan mempertahankan stabilitas makroekonomi.⁴ Dalam beberapa studi, desentralisasi fiskal berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Proksi variabel desentralisasi fiskal yaitu dana alokasi umum (DAU) lebih menjanjikan pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan bentuk variabel desentralisasi fiskal lainnya walaupun desain kebijakan DAU tidak mendukung pemerataan antar daerah.⁵

Akan tetapi tidak selamanya desentralisasi fiskal dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari studi empiris yang menggunakan bentuk variabel lain dari desentralisasi

fiskal yakni bagi hasil pajak dan bukan pajak dimana variabel ini menurunkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu studi yang lain menyimpulkan bahwa setelah pelaksanaan desentralisasi fiskal, kesenjangan antar wilayah di Indonesia semakin besar.⁶

Beberapa studi menyarankan bahwa kurangnya bukti yang konsisten tentang hubungan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan pentingnya untuk melakukan investigasi tidak hanya tentang dampak langsung desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kemungkinan dampak secara tidak langsung dari desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut studi-studi empiris tentang desentralisasi fiskal, mungkin desentralisasi fiskal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui beberapa variabel makroekonomi.⁷

Salah satu variabel makroekonomi yang merupakan jembatan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi adalah variabel stabilitas makroekonomi. Studi-studi empiris yang menggunakan variabel stabilitas makroekonomi dalam tulisannya adalah studi yang dilakukan oleh Prud'homme tahun 1995, Fornasari, Webb dan Zou tahun 2000, Martinez-Vazquez dan McNab tahun 2006, King dan Ma tahun 2001, Neyapti tahun 2004, dan Martinez-Vazquez dan McNab tahun 2006. Studi-studi empiris tersebut menemukan bukti bahwa desentralisasi fiskal berdampak positif terhadap stabilitas makroekonomi.⁸

Namun, studi-studi empiris lainnya seperti studi Feltenstein dan Iwata tahun 2005, Shah tahun 2006 dan Thornton tahun 2007 menemukan bukti yang berlawanan dengan studi-studi sebelumnya bahwa desentralisasi fiskal mempunyai dampak negatif terhadap stabilitas makroekonomi, walaupun pengaruhnya tidak signifikan. Bahkan studi Treisman tahun 2000, Rodden dan Wibbels tahun 2002 dan Martinez-Vazquez dan McNab tahun 2003 menyimpulkan bahwa bentuk hubungan antara desentralisasi fiskal dan stabilitas makroekonomi tidak diketahui secara jelas.⁹ Oleh karena itu, berdasarkan literatur-literatur yang ada hubungan antara desentralisasi fiskal dan stabilitas makroekonomi tidak memberikan bukti yang konklusif berkaitan dengan kesimpulan baik tanda arah maupun signifikansi hubungannya. Dengan

¹ J. Martinez-Vazquez dan R. M. Macnab, "Fiscal Decentralization, Macrostability and Growth", *Hacienda Publica Espanola/Revista de Economia Publica*, Vol. 179 (4), 2006, hlm. 25-49.

² Ika, Syahrir, dkk., *Risiko Fiskal Daerah: Menjaga Kesehatan Fiskal dan Kesinambungan Pembangunan Cetakan Kedua*, Solo: Era Adicitra Intermedia, 2013, hlm. 80.

³ Mifda, 2011, Percepatan Pembangunan dengan Desentralisasi Fiskal, (*online*), (http://www.kompasiana.com/mifda/percepatan-pembangunan-dengan-desentralisasi-fiskal_550df242a33311a22dba7e61, diunduh 12 Januari 2015).

⁴ Nasir Iqbal dan Saima Nawaz, "Fiscal Decentralization and Macroeconomic Stability: Theory and Evidence from Pakistan", *MPRA paper*, No. 27184, 2010, hlm. 1.

⁵ Ika, Syahrir, dkk., *Op. Cit*, hlm. 81.

⁶ Ika, Syahrir, dkk., *Op. Cit*, hlm. 81.

⁷ Philip Bodman, Harry Campbell, Kelly-Ana Heaton dan Andrew Hodge, "Fiscal Decentralization, Macroeconomic Conditions and Economic Growth in Australia", *Macroeconomics Research Group*, ISSN 1833-4474, 2009, hlm. 4.

⁸ Nasir Iqbal dan Saima Nawaz, *Op. Cit*, hlm. 1.

⁹ *Ibid*.

begitu, dampak desentralisasi fiskal terhadap stabilitas makroekonomi adalah ambigu artinya bisa bertanda positif atau negatif.¹⁰

Umumnya studi-studi empiris tersebut menggunakan proksi tingkat inflasi sebagai indikator stabilitas makroekonomi, kecuali studi yang dilakukan oleh Iqbal dan Nawaz tahun 2010 menggunakan *Misery Index* (MI) untuk memproksi stabilitas makroekonomi. Namun demikian, studi Iqbal dan Nawaz tahun 2010 dilakukan pada level nasional yaitu Pakistan.

Pada dasarnya tulisan ini mengaplikasikan proksi *MI* untuk stabilitas makroekonomi yang bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh desentralisasi fiskal terhadap stabilitas makroekonomi. Akan tetapi, dibandingkan studi empiris sebelumnya yang dilakukan oleh Iqbal dan Nawaz tahun 2010, tulisan ini membuat suatu hal yang sedikit berbeda. Perbedaan tersebut adalah unit analisis yang digunakan yaitu tingkat sub-nasional (provinsi). Pertimbangannya adalah ketika data desentralisasi fiskal dan stabilitas makroekonomi yang digunakan adalah tingkat nasional maka data tersebut hanya dapat menjelaskan bagaimana kedua variabel tersebut berkorelasi di tingkat nasional (negara). Fitur ini tidak bisa menjelaskan bagaimana hubungan antara kedua variabel tersebut pada masing-masing daerah tertentu di dalam negara. Hingga saat ini, literatur empiris mengenai dampak desentralisasi fiskal terhadap stabilitas makroekonomi dengan proksi *MI*, khususnya di Indonesia belum penulis temukan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, tulisan tentang dampak desentralisasi fiskal terhadap stabilitas makroekonomi Indonesia penting untuk terus dilakukan. *Pertama*, desentralisasi fiskal sudah dilaksanakan di Indonesia lebih dari satu dekade sehingga manfaat pelaksanaan desentralisasi fiskal yang banyak mengeluarkan dana ke daerah tersebut harus bisa diketahui secara jelas, apakah memberikan dampak positif atau negatif terhadap perekonomian daerah tersebut termasuk kondisi stabilitas makroekonomi daerah tersebut. Jika kebijakan desentralisasi fiskal berdampak positif terhadap stabilitas makroekonomi maka kebijakan tersebut wajib untuk diteruskan walaupun perlu ada revisi dalam hal pelaksanaannya. Sebaliknya, kebijakan tersebut perlu untuk dikaji lebih mendalam apakah masih perlu untuk diteruskan atau tidak. *Kedua*, tulisan ini bertujuan untuk mengisi *gap research* yang belum dilakukan oleh tulisan lain yaitu unit analisisnya adalah tingkat sub-nasional (provinsi) atau pemerintah daerah.

B. Perumusan Masalah

Salah satu peran provinsi setelah adanya kebijakan desentralisasi fiskal adalah setiap provinsi memiliki kewajiban untuk terus memantau dan mengendalikan perkembangan inflasi dan tingkat pengangguran di daerahnya agar tetap stabil. Hal ini dimaksudkan agar stabilitas makroekonomi di daerah tersebut tetap terpelihara sehingga akhirnya menciptakan stabilitas makroekonomi secara nasional. Stabilitas makroekonomi dapat tercipta jika tingkat inflasi dan pengangguran baik di daerah maupun nasional dapat terjaga.

Dalam kasus negara kesatuan seperti Indonesia dimana kebijakan moneter masih merupakan wewenang pusat, desentralisasi dapat menyebabkan upaya pengontrolan inflasi dan pengangguran sulit untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan upaya koordinasi tidak mudah untuk dilakukan. Jika koordinasi ini tidak berjalan baik maka tidak mungkin tercipta kondisi makroekonomi yang stabil. Namun demikian, desentralisasi juga menyebabkan setiap provinsi mengetahui secara jelas faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya instabilitas makroekonomi di daerahnya. Selain itu, setiap provinsi juga mempunyai wewenang fiskal yang besar dalam mengendalikan dan mempertahankan stabilitas makroekonomi di daerahnya. Oleh karena itu, melalui desentralisasi setiap provinsi mampu untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab instabilitas makroekonomi dan menggunakan kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan terkait stabilitas makroekonomi.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, ini menjadi hal yang krusial untuk dilakukan analisis tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap stabilitas makroekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, pertanyaan utama dalam tulisan ini adalah bagaimanakah pengaruh desentralisasi fiskal terhadap stabilitas makroekonomi di Indonesia. Jika desentralisasi fiskal dapat menciptakan stabilitas makroekonomi artinya saat desentralisasi fiskal koordinasi antar daerah dapat berjalan baik dan setiap daerah menggunakan wewenang fiskalnya untuk mengendalikan dan mempertahankan stabilitas makroekonomi. Begitu pula jika terjadi sebaliknya.

C. Tujuan Tulisan

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan tersebut maka ada 2 (dua) tujuan dari tulisan ini. *Pertama*, tulisan ini bertujuan ingin mengetahui bagaimana perkembangan stabilitas makroekonomi di provinsi-provinsi di Indonesia selama pelaksanaan desentralisasi fiskal. *Kedua*,

¹⁰ *Ibid*, hlm. 1-2.

tulisan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal yang sudah diterapkan di Indonesia terhadap kondisi stabilitas makroekonomi di provinsi-provinsi di Indonesia.

D. Kerangka Pemikiran

1. Konsep Desentralisasi Fiskal

Sebenarnya istilah desentralisasi sudah sejak lama diterapkan di Indonesia. Dalam UU No. 5 Tahun 1974 yang mengatur tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah diatur mengenai dasar-dasar sistem hubungan pusat-daerah yang dirangkum dalam tiga prinsip, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan (*medebewind*). Dalam UU tersebut, desentralisasi didefinisikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah.¹¹

Dalam UU yang baru yakni UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 7 dan UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 8, desentralisasi didefinisikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom, untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kebijakan desentralisasi ini dilakukan dalam rangka untuk lebih mendorong dan meningkatkan aktivitas pembangunan di seluruh daerah sesuai dengan potensi dan permasalahan daerah bersangkutan serta aspirasi serta keinginan masyarakat setempat.¹² Desentralisasi merupakan alat untuk meningkatkan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Implementasi desentralisasi terutama terdiri dari pembagian fungsi/tugas/kewenangan antar level pemerintah. Desentralisasi fiskal biasanya didahului reformasi dari sisi pengeluaran, kemudian diikuti oleh sisi penerimaan.

Secara umum, konsep desentralisasi terdiri atas Desentralisasi Politik (*Political Decentralization*), Desentralisasi Fiskal (*Fiscal Decentralization*), Desentralisasi Administratif (*Administrative Decentralization*) dan Desentralisasi Ekonomi (*Economic or Market Decentralization*).¹³ Dari keempat bentuk desentralisasi tersebut, desentralisasi yang sudah diterapkan di Indonesia meliputi Desentralisasi Politik, Desentralisasi Administratif, dan Desentralisasi Fiskal. *Political or democratic decentralization implies directly local governments thereby making elected officials accountable to*

*citizens. Administrative decentralization empower these government to hire and fire local staff without any reference to higher level governments. Administrative decentralization, where decision making is shifted to regional and local offices of the central government. Fiscal decentralization ensure that all elected officials weigh carefully the joys of spending some one else's money as well as pains associated with rising revenues from the electrorate and facing the possibility of being voted out.*¹⁴

Dari perspektif politik, desentralisasi bertujuan menciptakan distribusi pembagian kekuasaan yang lebih adil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (regional dan lokal). Dari perspektif administrasi, pemerintah pusat menyerahkan sejumlah kewenangan untuk dikelola oleh pemerintah daerah, sehingga dapat mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Dari perspektif keuangan (fiskal), desentralisasi diarahkan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah serta mengurangi ketimpangan atau disparitas fiskal antar pemerintah daerah (*horizontal imbalances*) maupun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical imbalances*).¹⁵ Dalam konteks ini akan dibahas secara lebih mendalam tentang desentralisasi fiskal dimana desentralisasi fiskal merupakan salah satu komponen utama dari desentralisasi.

Desentralisasi fiskal sudah tiga belas tahun diimplementasikan di Indonesia yakni sejak penerapan UU tentang Otonomi Daerah yang didalamnya mengatur tentang desentralisasi fiskal. Sejak saat itu terjadi proses pelimpahan berbagai wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah/daerah otonom dalam bidang fiskal atau disebut juga desentralisasi fiskal. Seiring berlalunya waktu, tidak bisa disangkal bahwa otonomi daerah dan desentralisasi fiskal selama dekade terakhir tersebut telah mampu membangun stabilitas politik dan demokrasi yang dinamis. Sebenarnya apa itu desentralisasi fiskal?

Secara teori, konsep desentralisasi fiskal itu sendiri didefinisikan sebagai pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintahan yang lebih tinggi dan menentukan belanja rutin dan investasi atau dengan kata lain pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk menentukan regulasi terhadap anggaran.¹⁶ Ada juga yang mendefinisikan desentralisasi fiskal sebagai proses delegasi tanggungjawab fiskal kepada pemerintah daerah termasuk mendelegasikan kekuasaan untuk pajak dan pengeluaran dengan

¹¹ Mudrajad Kuncoro, *Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan Edisi Kelima*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010, hlm. 201.

¹² Sjafrizal, *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, hlm. 272.

¹³ D.S.Priyarsono, *Dari Pertanian ke Industri: Analisis Pembangunan dalam Perspektif Ekonomi Regional*, Bogor: IPB Press, 2011, hlm. 145.

¹⁴ Ika, Syahrir, dkk., *Op. Cit*, hlm. 13.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 14.

¹⁶ Mifda, *Op. Cit*.

pengaturan untuk mengoreksi ketidakseimbangan antara sumber daya dan kewajiban.¹⁷

Selain itu, desentralisasi fiskal dapat didefinisikan sebagai penyerahan sebagian dari tanggung jawab fiskal atau keuangan negara dari pemerintah pusat kepada jenjang pemerintahan dibawahnya (provinsi, kabupaten atau kota).¹⁸ Ada juga yang mendefinisikan bahwa desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik, sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan.¹⁹

Desentralisasi fiskal juga dapat diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintah dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan sesuai dengan peranan pemerintah yang mempunyai tiga fungsi utama yaitu distribusi, alokasi dan stabilisasi.²⁰

Pada intinya, gagasan dasar desentralisasi fiskal ialah penyerahan beban tugas pembangunan, penyediaan layanan publik dan sumber daya keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sehingga tugas-tugas itu akan lebih dekat ke masyarakat. Dengan begitu, kemampuan pemerintah daerah akan dapat ditingkatkan dan pertanggungjawaban akan dapat lebih terjamin. Secara umum, desentralisasi fiskal menghendaki adanya devolusi antar jenjang pemerintah dari peran keuangan, biasanya dari jenjang pemerintahan yang lebih tinggi ke jenjang yang lebih rendah.²¹

Bagi Indonesia, desentralisasi fiskal merupakan salah satu mekanisme transfer dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam kaitannya dengan kebijakan keuangan negara. Kebijakan keuangan negara tersebut untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (*fiscal sustainability*) dan memberikan stimulus terhadap aktivitas perekonomian masyarakat, diharapkan dengan kebijakan fiskal akan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah

yang sepadan dengan besarnya kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom.²²

Desentralisasi fiskal sebagai komponen utama dalam desentralisasi, selain melakukan penyerahan sebagian wewenang pemerintah pusat ke daerah, juga harus memastikan bahwa daerah mendapatkan sumber-sumber keuangan yang memadai untuk menjalankan wewenang dan fungsinya.²³ Oleh karena itu, desentralisasi fiskal dilakukan melalui pelimpahan tanggung jawab fiskal untuk belanja publik dan penciptaan atau pengumpulan pendapatan dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi atau lokal.²⁴ Salah satu tujuan dari desentralisasi fiskal adalah memperbaiki ketidakadilan fiskal dan efisiensi fiskal yang timbul dari perbedaan kemampuan fiskal daerah, memperbaiki struktur fiskal, dan memobilisasi pendapatan regional maupun nasional.²⁵

Ada tiga argumentasi tentang pentingnya desentralisasi fiskal.²⁶ *Pertama*, jika unsur-unsur belanja dan tingkat pajak ditentukan pada jenjang pemerintahan yang lebih dekat ke masyarakat maka layanan publik di daerah akan dapat diperbaiki dan masyarakat akan lebih puas dengan layanan yang diberikan pemerintah. *Kedua*, pemerintah daerah yang lebih kuat akan menunjang pembangunan bangsa karena betapa pun masyarakat lebih mudah mengidentifikasi diri dengan pemerintah daerah ketimbang pemerintah pusat. Apabila tanggung jawab mengenai perpajakan, kebijakan keuangan dan layanan publik diserahkan kepada pemerintah daerah, maka pemerintah daerah akan saling bersaing untuk melakukan hal yang terbaik bagi rakyat yang tentunya juga akan memperbaiki pembangunan bangsa.

Ketiga, keseluruhan mobilisasi sumber daya akan bertambah baik karena pihak pemerintah daerah dapat lebih tanggap dan mudah menarik pajak dari sektor-sektor ekonomi yang tumbuh cepat jika dibanding pemerintah pusat. Dalam memobilisasi sumber daya, pemerintah pusat biasanya terkendala oleh kondisi geografis dan rentang kendali. Oleh sebab itu, apabila pemerintah daerah diberi tanggung jawab yang lebih besar maka mobilisasi sumber daya akan dapat dilakukan dengan lebih baik.

Umumnya, desentralisasi fiskal memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: (1) mengurangi peran

¹⁷ S. Malik, M. Hass dan S. Hussain, "Fiscal Decentralization and Economic Growth in Pakistan", *The Pakistan Development Review*, Vol. 45(4), 2006, hlm. 845-854.

¹⁸ Wahyu Kumorotomo, *Desentralisasi Fiskal: Politik dan Perubahan Kebijakan 1974-2004*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 1.

¹⁹ Juli Panglima Saragih, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 83.

²⁰ D. S. Priyarsono, *Op.Cit.*, hlm. 146.

²¹ Wahyu Kumorotomo, *Op.Cit.*, hlm. 5-9.

²² Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, hlm. 116.

²³ Ika, Syahrir, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 179.

²⁴ Nasir Iqbal, Musleh ud Din dan Ejaz Ghani, "Fiscal Decentralization and Economic Growth: Role of Democratic Institutions", *Pakistan Institute of Development Economics (PIDE) Working Papers*, Vol. 89, 2013, hlm. 1.

²⁵ *Ibid*, hlm. 14.

²⁶ Wahyu Kumorotomo, *Op.Cit.*, hlm. 6.

dan tanggung jawab di antara pemerintah pada semua tingkat, (2) memperhitungkan bantuan atau transfer antar pemerintah, (3) memperkuat sistem penerimaan daerah atau merumuskan penyediaan jasa-jasa lokal, (4) memprivatisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan (5) menyediakan suatu jaringan pengaman bagi fungsi redistribusi. Oleh karena itu, keberhasilan desentralisasi fiskal dapat dinilai dari sejauh mana fungsi-fungsi diatas telah terlaksana.²⁷

Namun demikian, secara khusus desentralisasi fiskal mempunyai fungsi utama untuk memperbaiki efisiensi sektor publik dan mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Efisiensi ekonomi ditingkatkan oleh desentralisasi karena provinsi dan pemerintah tingkat lokal mempunyai informasi lebih baik dan pengetahuan yang lengkap tentang daerahnya dibandingkan pemerintah pusat. Pemerintah tingkat lokal mempunyai hubungan yang erat dengan institusi dan dapat mengendalikan mereka dengan tepat.²⁸

Efektivitas kebijakan desentralisasi fiskal tergantung pada (1) tepatnya penempatan pengeluaran, sesuai pembagian fungsi antara berbagai tingkat pemerintahan yang tergantung pada keuntungan komparatifnya (disebut prinsip subsidiaritas), (2) tepatnya penempatan pajak atau penerimaan, dan (3) desain yang efisien dari sistem transfer dan pengimplementasian yang tepat.²⁹ Sementara itu, *outcome* dari desentralisasi fiskal meliputi (1) pendapatan daerah yang meningkat, (2) ketimpangan pendapatan atau kesejahteraan antar daerah menurun, (3) tingkat mortalitas menurun, (4) tingkat pendidikan dan standar hidup masyarakat meningkat, serta (5) *civil society* tumbuh.³⁰

Di Indonesia, desentralisasi fiskal sudah berjalan lebih dari satu dekade. Besaran dana yang dikucurkan dari pusat (APBN) ke daerah sudah mengalami peningkatan yang signifikan. Oleh karena itu banyak pihak berharap bahwa desentralisasi fiskal ini dapat berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Ada banyak sudut pandang dari para ahli ekonomi dalam menentukan indikator sukses atau tidaknya pelaksanaan desentralisasi fiskal. Namun begitu, ada sepuluh indikator suksesnya desentralisasi fiskal yaitu rasio antara pendapatan asli

daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah, rasio antara PAD dengan pengeluaran atau belanja daerah, rasio antara belanja sosial dengan total belanja daerah, rasio antara belanja infrastruktur dengan total belanja daerah, koefisien ketimpangan fiskal vertikal, kesenjangan (ketimpangan) pendapatan antar daerah, dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, kesinambungan fiskal, tujuan-tujuan spesifik sektoral dan kesejahteraan sosial.³¹

2. Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dalam literatur-literatur ekonomi tentang desentralisasi fiskal disebutkan bahwa desentralisasi fiskal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara langsung melalui peningkatan efisiensi sektor publik.³² Salah satu teori yang dapat menjelaskan hubungan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi adalah teori tradisional federalisme fiskal. Teori tradisional federalisme fiskal memaparkan bagaimana desentralisasi fiskal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yakni dalam bentuk kerangka normatif umum yang ditandai dengan penyerahan fungsi ke berbagai tingkat pemerintahan. Menurut teori ini, proses dari desentralisasi fiskal dapat menghasilkan efisiensi ekonomi yang lebih besar dalam alokasi sumber daya di sektor publik.³³

Desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang erat karena tiga alasan berikut. *Pertama*, pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai tujuan dari desentralisasi fiskal dan efisiensi dalam alokasi sumber daya di sektor publik. *Kedua*, desentralisasi fiskal merupakan niat eksplisit pemerintah untuk mengadopsi kebijakan yang mempengaruhi kenaikan keberlanjutan dalam pendapatan per kapita. *Ketiga*, pertumbuhan per kapita lebih mudah untuk diukur dan diinterpretasikan dibandingkan indikator kinerja ekonomi lainnya.³⁴

Penjelasan teoritik bagaimana desentralisasi fiskal dapat menciptakan efisiensi ekonomi dalam sektor publik sehingga akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dibedakan menjadi tiga kelompok.³⁵ *Pertama*, efisiensi ekonomi dapat dihasilkan melalui mobilisasi sumber daya yang terjadi melalui desentralisasi fiskal. Desentralisasi

²⁷ D.S.Priyarsono, *Op.Cit.*, hlm. 146.

²⁸ Muhammad Zahir Faridi, "Contribution of Fiscal Decentralization to Economic Growth: Evidence from Pakistan", *Pakistan Journal of Social Sciences*, Vol. 31, No. 1, Juni 2011, hlm. 1-2.

²⁹ ShahNawaz Malik, Mahmood-Ul-Hassan dan Shahzad Hussain, "Fiscal Decentralization and Economic Growth in Pakistan", *The Pakistan Development Review*, 45:4, 2006, hlm. 845.

³⁰ Ika, Syahrir, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 18.

³¹ *Ibid*, hlm. 78-83.

³² Nasir Iqbal dan Saima Nawaz, *Op. Cit.*, hlm. 6.

³³ Nasir Iqbal, Musleh ud Din dan Ejaz Ghani, *Op. Cit.*, hlm. 2.

³⁴ Ahmad Jafari Samimi, Saeed Karimi Petanlar, Gholamreza Keshavarz Haddad dan Mohammad Alizadeh, "Fiscal Decentralization and Economic Growth: A Nonlinear Model for Provinces of Iran", *Iranian Economic Review*, Vol. 15, No. 26, 2010, hlm. 126.

³⁵ *Ibid*, hlm. 3-4.

fiskal memberikan otonomi dan dana yang lebih besar ke pemerintah sub nasional. Dengan tersedianya dana dan otonomi yang lebih besar dalam proses membuat keputusan, pemerintah daerah dipaksa memobilisasi sumber daya yang tersedia dalam yurisdiksi mereka sendiri, dibandingkan menunggu penyediaan barang dan jasa publik atau solusi yang berasal dari pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan penekanan yang lebih besar pada efisiensi ekonomi.

Kedua, teorema desentralisasi memberikan mekanisme dimana desentralisasi fiskal dapat menyebabkan efisiensi ekonomi yang lebih besar. Teorema ini menyatakan bahwa preferensi untuk barang dan jasa publik berbeda antar individu dan wilayah. Tingkat kesejahteraan yang dicapai oleh pemerintah nasional melalui penyediaan barang dan jasa publik yang seragam selalu *inferior* terhadap apa yang dapat dicapai dengan menyediakan barang-barang dan jasa-jasa publik dalam penyusunan desentralisasi yang memungkinkan untuk perbedaan penyediaan barang dan jasa antar wilayah. Hal ini karena pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih baik tentang preferensi masyarakatnya dibandingkan pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah selalu berkinerja lebih baik dalam penyediaan barang-barang dan jasa-jasa publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Ketiga, persaingan diantara yurisdiksi dipandang sebagai mekanisme penting untuk mendorong efisiensi di bidang perpajakan, regulasi dan penyediaan barang dan jasa. Dalam pendekatan pilihan publik, desentralisasi fiskal dapat menyebabkan terjadinya persaingan antar yurisdiksi untuk faktor-faktor produksi yang bergerak.

Berdasarkan hal-hal tersebut, desentralisasi fiskal merupakan strategi yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan efisiensi sektor publik. Yakni melalui: (1) upaya yang merampingkan kegiatan sektor publik, (2) mengurangi biaya operasional dan informasi dari jasa pengiriman, dan (3) meningkatkan persaingan antar pemerintah sub nasional dalam memberikan layanan publik.³⁶

3. Hubungan antara Desentralisasi Fiskal dan Stabilitas Makroekonomi

Selain secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, desentralisasi fiskal juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung. Desentralisasi fiskal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung melalui peningkatan efisiensi ekonomi, penciptaan keadilan fiskal horizontal dan menjaga

stabilitas makroekonomi.³⁷ Salah satu variabel makroekonomi yang merupakan variabel perantara dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi adalah stabilitas makroekonomi. Banyak studi empiris tentang desentralisasi fiskal yang menggunakan variabel tersebut dalam studi-studinya untuk mengetahui pengaruh dari desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi seperti studi Treisman tahun 2000, studi Rodden dan Wibbels tahun 2002 dan studi Martinez-Vazquez dan McNab tahun 2003.

Namun, dalam studi-studi empiris tentang desentralisasi fiskal dan stabilitas makroekonomi ada 2 (dua) pandangan yang berbeda tentang dampak desentralisasi fiskal terhadap stabilitas makroekonomi.³⁸ *Pertama*, pandangan yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal dan stabilitas makroekonomi berhubungan negatif. Melalui desentralisasi fiskal, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar dalam menentukan tingkat pengeluaran dan pendapatannya. Kondisi ini akhirnya akan membuat sistem manajemen fiskal menjadi lebih rumit terutama dalam sistem pengawasan yang sangat penting untuk menanamkan pengelolaan anggaran yang efisien. Selain itu, pemerintah daerah biasanya memiliki program pembangunan sendiri yang mungkin berbeda dengan program pembangunan pemerintah pusat sehingga akan menyebabkan masalah dalam hal koordinasi.

Selain itu, desentralisasi fiskal dianggap menyebabkan terjadinya pemborosan fiskal oleh pemerintah daerah. Karena desentralisasi fiskal meningkatkan insentif bagi pemerintah daerah untuk berperilaku oportunistik dengan mencoba mengalihkan beban pengeluaran daerah ke pusat secara keseluruhan. Hal ini akhirnya akan menyebabkan koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter menghadapi tantangan terhadap stabilitas ekonomi nasional.³⁹

Kedua, pandangan yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal mempunyai dampak yang positif terhadap stabilitas makroekonomi. Pandangan ini menganggap bahwa desentralisasi fiskal menyebabkan mekanisme *sharing* pendapatan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi jelas. Kondisi ini dapat menyebabkan kompetisi untuk sumber-sumber fiskal antara pemerintah

³⁷ Jorge Martinez-Vazquez dan Robert Macnab, *Op. Cit.*

³⁸ Ahmad Zafarullah Abdul Jalil, Mukaramah Harun dan Siti Hadijah Che Mat, "Macroeconomic Instability and Fiscal Decentralization: An Empirical Analysis", *Prague Economic Papers*, 2, 2012, hlm. 151.

³⁹ Remy Prud'homme, "On The Dangers of Decentralization", *The World Bank Policy Research Working Paper*, 1252, 1995, hlm. 1 – 35.

³⁶ Nasir Iqbal, Musleh ud Din dan Ejaz Ghani, *Op. Cit.*, hlm. 1.

pusat dan daerah menjadi berkurang. Oleh karena itu, desentralisasi fiskal dapat berdampak positif terhadap stabilitas makroekonomi karena persaingan fiskal antar tingkat pemerintahan yang berbeda telah terbukti melemahkan tujuan kebijakan fiskal nasional terutama dengan mendorong kebijakan fiskal yang pro-siklikal.⁴⁰

Beberapa studi empiris tentang desentralisasi fiskal dan stabilitas makroekonomi sudah dilakukan tapi tidak sebanyak studi empiris yang mengkaitkan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, studi-studi empiris tersebut hampir semuanya menggunakan tingkat inflasi sebagai indikator untuk mengukur stabilitas makroekonomi, walaupun sudah ada studi-studi empiris yang menggunakan indikator lain untuk memproksi stabilitas makroekonomi. Studi empiris yang menggunakan tingkat inflasi sebagai indikator stabilitas makroekonomi diantaranya studi yang dilakukan oleh Treisman tahun 2000. Treisman tahun 2000 menemukan bahwa pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkat inflasi untuk kelompok negara-negara tertentu dalam 87 negara tidak jelas pengaruhnya. Artinya pada kelompok negara tertentu memberikan dampak yang positif tapi dampak negatif jika dilakukan terhadap kelompok negara lain yang berbeda.⁴¹

Kemudian ada studi King dan Ma tahun 2001 yang mengidentifikasi pengaruh desentralisasi fiskal (dalam tulisannya variabel desentralisasi fiskal diproksi dengan *degree of tax centralization*) terhadap tingkat inflasi. Dalam tulisannya, King dan Ma menemukan hubungan negatif dan signifikan antara desentralisasi fiskal (yakni desentralisasi penerimaan) dengan instabilitas makroekonomi (diukur oleh rata-rata tingkat inflasi) di negara-negara maju tapi tidak signifikan untuk keseluruhan sampel.⁴² Studi lain dilakukan oleh Neyapti tahun 2004 yang menginvestigasi hubungan antara desentralisasi penerimaan dan inflasi dimana studinya menemukan bukti bahwa hubungan antara keduanya adalah negatif.⁴³

Selanjutnya ada studi Feltenstein dan Iwata tahun 2005 yang menginvestigasi dampak desentralisasi fiskal dan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi dan

inflasi di China. Studi mereka menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal mempunyai implikasi sebaliknya terhadap tingkat inflasi di China. Artinya desentralisasi fiskal di China tidak bagus untuk stabilitas harga.⁴⁴ Ada juga studi yang dilakukan oleh Martinez-Vazquez dan McNab tahun 2006 yang meneliti dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makroekonomi. Mereka menemukan bahwa desentralisasi fiskal berdampak positif terhadap stabilitas harga di negara-negara maju dan secara positif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui stabilitas harga.⁴⁵

Studi Shah tahun 2006 tentang desentralisasi fiskal juga menemukan fakta bahwa desentralisasi fiskal berdampak negatif terhadap tingkat inflasi sedangkan dampaknya terhadap manajemen inflasi adalah positif, namun keduanya tidak signifikan.⁴⁶ Kemudian ada studi yang dilakukan oleh Thornton tahun 2007 dan Baskaran tahun 2007 dimana mereka melakukan studi tentang pengaruh desentralisasi fiskal (dalam studinya desentralisasi fiskal diproksi oleh desentralisasi penerimaan) terhadap inflasi. Studi Thornton tahun 2007 menemukan bukti bahwa desentralisasi penerimaan tidak berdampak signifikan terhadap inflasi⁴⁷, namun studi Baskaran tahun 2011 menemukan fakta bahwa desentralisasi penerimaan secara signifikan berkorelasi negatif dengan inflasi. Artinya desentralisasi penerimaan menyebabkan rendahnya tingkat inflasi.⁴⁸

Untuk studi tentang desentralisasi fiskal yang dilakukan di Indonesia diantaranya ada studi Tirtosuharto dan Adiwilaga tahun 2013. Studi mereka bertujuan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap inflasi regional di Indonesia. Tulisan ini menemukan bahwa desentralisasi berdampak terhadap inflasi regional di Indonesia, dimana kenaikan desentralisasi fiskal juga menaikkan volatilitas inflasi regional. Hal ini terjadi karena pengeluaran pemerintah daerah yang tidak efisien.⁴⁹

⁴⁰ John Thornton, "Fiscal Decentralization and Economic Growth Reconsidered", *Journal of Urban Economic*, Vol. 61, 2007, hlm. 64 – 70.

⁴¹ Daniel Treisman, "Decentralization and Inflation: Commitment, Collective Action, or Continuity?", *American Political Science Review*, Vol. 94, No. 4, 2000, hlm. 837 – 857.

⁴² David King dan Yue Ma, "Fiscal Decentralization, Central Bank Independence, and Inflation", *Economics Letters* 72, 2001, hlm. 95 – 98.

⁴³ Bilin Neyapti, "Fiscal Decentralization, Central Bank Independence, and Inflation: A Panel Investigation", *Economics Letters* 82, 2004, hlm. 227 – 230.

⁴⁴ Andrew Feltenstein dan Shigeru Iwata, "Decentralization and Macroeconomic Performance in China: Regional Autonomy has Its Costs", *Journal of Development Economics* 76, 2005, hlm. 481 – 501.

⁴⁵ Jorge Martinez-Vazquez dan Robert Macnab, *Op. Cit.*, hlm. 25 – 49.

⁴⁶ Anwar Shah, "Fiscal Decentralization and Macroeconomic Management", *International Tax Public Finance*, Vol. 13, 2006, hlm. 437 – 462.

⁴⁷ John Thornton, "Further Evidence on Revenue Decentralization and Inflation", *Economics Letters* 95, 2007, hlm. 140 – 145.

⁴⁸ Thushyanthan Baskaran, "Revenue Decentralization and Inflation: A Re-evaluation", *MPRA Paper No. 36911*, 2011, hlm. 1 – 8.

⁴⁹ Darius Tirtosuharto dan Handri Adiwilaga, "Decentralization and Regional Inflation in Indonesia", *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Vol. 16 No. 2, 2013, hlm. 149 – 166.

Selain menggunakan tingkat inflasi sebagai proksi dari stabilitas makroekonomi, ada juga studi empiris yang menggunakan proksi lain yaitu suatu indeks yang disebut *Misery Index* (MI). Indeks ini merupakan penjumlahan antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Studi empiris yang pertama kali menggunakan indeks tersebut adalah studi yang dilakukan oleh Iqbal dan Nawaz tahun 2010. Studi mereka dilakukan pada level nasional yaitu Pakistan. Studi Iqbal dan Nawaz tersebut menemukan bukti bahwa desentralisasi fiskal berdampak positif dan signifikan terhadap stabilitas makroekonomi. Studi-studi empiris tentang desentralisasi fiskal dan stabilitas makroekonomi tersebut terangkum dalam Tabel 1.

Studi Iqbal dan Nawaz tahun 2010 adalah studi yang pertama kali menghitung *MI* dan menggunakannya dalam studi empiris. *MI* dihitung dengan menjumlahkan antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran untuk periode yang bersangkutan.

$$MI = UR + INF \tag{1}$$

Dimana *MI* adalah *Misery Index*, *UR* adalah tingkat pengangguran dan *INF* adalah tingkat inflasi.

Asumsi utama dalam *MI* adalah meningkatnya tingkat pengangguran dan tingginya inflasi mempunyai dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi, kenaikan indeks ini berarti memburuknya kondisi perekonomian, begitu pula

Tabel 1. Hubungan antara Desentralisasi Fiskal dan Stabilitas Makroekonomi

No.	Peneliti (Tahun)	Sampel Tulisan	Metode Tulisan	Hasil Tulisan
1.	Treisman (2000)	87 negara pada periode 1970-an dan 1980-an	Metode Panel Data	Hubungan antara desentralisasi fiskal dan inflasi tidak jelas untuk berbagai sampel negara yang digunakan.
2.	King dan Ma (2001)	49 negara pada periode 1973 – 1994	Metode Panel Data	Derajat sentralisasi pajak berkorelasi positif dengan inflasi yang tinggi
3.	Neyapti (2004)	Negara maju dan berkembang pada periode 1973 – 1994	Metode Panel Data	Hubungan antara desentralisasi fiskal dan inflasi adalah negatif.
4.	Feltenstein dan Iwata (2005)	China pada periode 1952 – 1996	Metode <i>vector autoregressive</i> (VAR)	Desentralisasi fiskal tidak baik untuk stabilitas harga.
5.	Shah (2006)	40 negara pada periode 1995 – 2000	Metode Panel Data	Desentralisasi fiskal berdampak negatif terhadap tingkat inflasi namun tidak signifikan
6.	Thornton (2007)	19 negara anggota OECD	Metode Panel Data	Desentralisasi fiskal berdampak negatif terhadap tingkat inflasi namun tidak signifikan
7.	Baskaran (2011)	19 negara anggota OECD	Metode Panel Data	Desentralisasi penerimaan berkorelasi negatif secara signifikan dengan inflasi
8.	Tirtosuharto dan Adiwilaga (2013)	26 provinsi di Indonesia pada periode 2003 – 2008	Metode Panel Data	Kenaikan desentralisasi fiskal menaikkan volatilitas inflasi regional
9.	Iqbal dan Nawaz (2010)	Pakistan pada periode 1979 – 2010	Metode OLS dan GMM	Desentralisasi fiskal berdampak positif dan signifikan terhadap stabilitas makroekonomi

Sumber: diringkas oleh penulis dari berbagai jurnal

D. Metodologi Penelitian

1. Implementasi Empiris: Data dan Spesifikasi Model

Umumnya studi empiris tentang desentralisasi fiskal dan stabilitas makroekonomi menggunakan variabel inflasi sebagai proksi dari stabilitas makroekonomi. Namun demikian, studi Martinez-Vazquez dan McNab tahun 2006 menyarankan bahwa proksi yang tepat untuk mengukur stabilitas makroekonomi adalah kombinasi antara tingkat inflasi dan pengangguran. Menggunakan konsep yang diutarakan oleh Arthur Okun maka kombinasi tersebut dibuat dalam suatu indeks yang disebut dengan *MI*.⁵⁰

sebaliknya. Kenaikan inflasi berbarengan dengan tingginya tingkat pengangguran menyebabkan rendahnya pengeluaran konsumen dan berkontribusi terhadap menurunnya perekonomian.⁵¹

Stabilitas makroekonomi suatu negara ditentukan oleh berbagai faktor ekonomi. Salah satu faktor yang mempengaruhi stabilitas makroekonomi adalah desentralisasi fiskal. Oleh karena itu, stabilitas makroekonomi yang diproksi oleh *MI*, seperti dalam persamaan (1) merupakan fungsi dari desentralisasi fiskal (*DF*) atau ditulis sebagai berikut.

$$MI = f(DF) \tag{2}$$

⁵⁰ Nasir Iqbal dan Saima Nawaz, *Loc. Cit.*, hlm. 6.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 6 – 7.

Persamaan (2) memberikan arti bahwa desentralisasi fiskal dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tapi melalui stabilitas makroekonomi. Desentralisasi fiskal digunakan sebagai pilihan kebijakan di negara-negara berkembang dan transisi yang dapat berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui stabilitas makroekonomi. Pernyataan ini diungkapkan oleh Prud'homme tahun 1995 dan Martinez-Vazquez dan McNab tahun 2006. Namun demikian, argumentasi teoritis tentang hubungan antara stabilitas makroekonomi dan desentralisasi fiskal tidak memberikan kesimpulan yang definitif baik arah maupun signifikansi hubungannya.⁵² Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan tanggung jawab kebijakan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah berkaitan dengan pengeluaran (belanja) dan penerimaan pendapatan. Untuk mengukur dampak dari desentralisasi fiskal, dalam tulisan ini menggunakan proksi desentralisasi penerimaan (DF^R) dan desentralisasi pengeluaran (DF^E).⁵³

Desentralisasi pengeluaran didefinisikan sebagai rasio pengeluaran pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi, terhadap total belanja nasional⁵⁴ atau pengeluaran negara. Desentralisasi fiskal yang tinggi, dalam hal ini desentralisasi pengeluaran, mengimplikasikan bahwa pemerintah daerah mempunyai otoritas yang besar dalam menggunakan seluruh kekayaan dan sumber daya di daerahnya dalam bentuk pengeluaran/belanja daerah. Besarnya kontribusi pengeluaran pemerintah daerah berpotensi menyebabkan instabilitas makroekonomi di daerah khususnya pengeluaran yang dilakukan untuk program dan aktivitas yang tidak produktif. Karena, alokasi sumber daya untuk pengeluaran/belanja pemerintah daerah menjadi tidak efisien. Hal ini menjelaskan bahwa hubungan antara desentralisasi pengeluaran dan stabilitas makroekonomi berkorelasi secara positif.

Desentralisasi penerimaan didefinisikan sebagai rasio penerimaan pemerintah daerah (pemerintah provinsi) terhadap penerimaan pemerintah pusat.⁵⁵ Desentralisasi penerimaan dapat meningkatkan efektifitas pengumpulan penerimaan sehingga mengurangi kebutuhan pemerintah untuk menggunakan stabilitas makroekonomi (inflasi dan/atau tingkat pengangguran) dalam menangani

masalah-masalah fiskal. Selain itu, pemerintah pusat mungkin memiliki kekuatan politik yang rendah untuk mendorong bank sentral mengejar kebijakan inflasinya. Akan tetapi, desentralisasi penerimaan juga mungkin mempersulit koordinasi kebijakan sehingga mengurangi kemampuan sektor publik untuk bereaksi terhadap tekanan inflasi. Oleh karena itu, hubungan antara desentralisasi penerimaan dan stabilitas makroekonomi diduga akan ambigu.⁵⁶

Untuk mengantisipasi masalah bias akibat dari *variables omitted* sehingga dapat mempengaruhi hubungan antara desentralisasi fiskal dan stabilitas makroekonomi maka beberapa variabel kontrol dimasukkan dalam spesifikasi model persamaan yang digunakan dalam tulisan ini. Oleh karena itu, model persamaan (2) menjadi:

$$MI = f(DF, Z) \quad (3)$$

dimana Z adalah vektor variabel-variabel kontrol. Variabel-variabel kontrol disini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas makroekonomi selain desentralisasi fiskal. Berdasarkan literatur-literatur ekonomi, stabilitas makroekonomi juga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.⁵⁷ Oleh karena itu, variabel-variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tingkat pendapatan per kapita (PPK) untuk mengukur daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah ($GROWTH$).

Spesifikasi model ekonometrik secara eksplisit dalam tulisan ini, seperti model yang diadopsi oleh Iqbal dan Nawaz tahun 2010, adalah sebagai berikut:

$$MI_t = \alpha_0 + \alpha_1 DF_t^E + \alpha_2 DF_t^R + \alpha_3 PPK_t + \alpha_4 GROWTH_t + \varepsilon_t \quad (4)$$

dimana variabel dependen adalah *Misery Index*, sedangkan variabel independennya meliputi desentralisasi pengeluaran, desentralisasi penerimaan, tingkat pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Variabel tingkat pendapatan per kapita dalam tulisan ini dinyatakan dalam bentuk logaritma.

Data yang digunakan dalam tulisan ini berasal dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Untuk membuat variabel MI , data yang digunakan meliputi data tingkat pengangguran dan tingkat inflasi yang berasal dari Statistik Indonesia publikasi BPS berbagai edisi. Data tingkat pengangguran yang digunakan merupakan rata-rata tingkat pengangguran pada bulan Februari dan Agustus tahun yang bersangkutan. Data inflasi menggunakan tahun dasar 2007 = 100 dan merupakan hasil olahan

⁵² *Ibid*, hlm. 7.

⁵³ Seperti studi yang dilakukan oleh Nasir Iqbal dan Saima Nawaz tahun 2010.

⁵⁴ Seperti studi yang dilakukan oleh Darius Tirtosuharto dan Handri Adiwilaga tahun 2013.

⁵⁵ Seperti studi yang dilakukan oleh Nasir Iqbal, Musleh ud Din dan Ejaz Ghani tahun 2013.

⁵⁶ Thushyanthan Baskaran, *Op. Cit.*, hlm. 1 – 8.

⁵⁷ Nasir Iqbal dan Saima Nawaz, *Op. Cit.*, hlm. 8 – 9.

dari data indeks harga konsumen (IHK).⁵⁸ Data untuk variabel pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan per kapita juga diperoleh dari Statistik Indonesia publikasi BPS berbagai edisi. Sedangkan data untuk desentralisasi fiskal baik penerimaan maupun pengeluaran pemerintah provinsi diperoleh dari Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi publikasi BPS berbagai edisi.

2. Strategi Estimasi

Struktur data pada tulisan ini adalah data panel dengan *cross-section* sebanyak 33 provinsi dan *time series* tahunan dengan periode waktu 2009 – 2013. Penggunaan periode waktu pada rentang tersebut karena keterbatasan data yang tersedia pada 33 provinsi di Indonesia. Implikasi dari data yang berbentuk panel tersebut maka spesifikasi model ekonometrik dalam persamaan (4) dapat ditulis kembali dalam bentuk sebagai berikut:

$$MI_t = \alpha_0 + \alpha_1 DF_{it}^E + \alpha_2 DF_{it}^R + \alpha_3 PPK_{it} + \alpha_4 GROWTH_{it} + \epsilon_{it} \tag{5}$$

Dimana *i* menyatakan *cross-section* yang digunakan dalam tulisan ini sedangkan *t* adalah jumlah periode waktu atau *time series* serta ϵ menyatakan *error term*.

Merujuk pada data yang berbentuk panel tersebut, tulisan ini akan menggunakan metode estimasi panel data. Digunakannya metode estimasi panel data dalam tulisan ini karena sifat data dari variabel-variabel yang digunakan dalam tulisan ini adalah *variant* baik *unit/cross sectional* maupun *time*. Dengan metode panel data, spesifikasi model empiris

yang digunakan dapat menangkap *variant* baik *unit/cross sectional* maupun *time* dari estimasinya. Untuk estimasi model panel data digunakan perangkat lunak STATA 11.

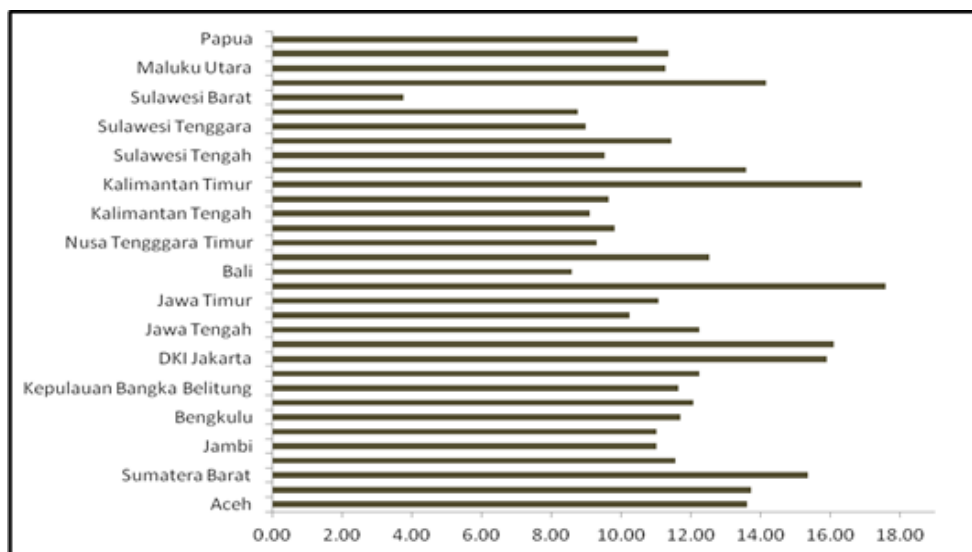
Metode panel data menurut Gujarati tahun 2012 ada 3 (tiga) jenis yaitu *Pooled Least Squares* (PLS), *Fixed Effect* (FE), dan *Random Effect* (RE). Untuk mendapatkan model panel data terbaik dari 3 jenis model tersebut akan digunakan beberapa pengujian. *Pertama*, *Chow test* untuk memilih model panel data antara PLS dan FE. *Kedua*, *Breusch Pagan Lagrange Multiplier* (LM) *test* untuk memilih model panel data antara PLS dan RE. *Ketiga*, *Hausman test* untuk memilih model panel data antara FE dan RE.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Stabilitas Makroekonomi dan Desentralisasi Fiskal di Indonesia

Indonesia adalah salah satu negara yang berbentuk kepulauan. Ketersediaan kebutuhan masing-masing daerah tergantung pada daerah lainnya. Hal ini mengakibatkan tingkat harga untuk barang yang sama di setiap daerah akan berbeda. Kondisi tersebut mempunyai implikasi terhadap tingkat inflasi antar daerah yang akan beraneka ragam. Selain mengakibatkan tingkat inflasi yang bervariasi, setiap daerah di Indonesia juga mempunyai keadaan ekonomi yang beragam. Ini berdampak terhadap kesempatan kerja di setiap daerah yang berbeda-beda. Akibatnya tingkat pengangguran di setiap daerah akan berbeda-beda juga. Perbedaan tingkat inflasi dan tingkat pengangguran di masing-masing

Gambar 1. Perkembangan Stabilitas Makroekonomi Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2013



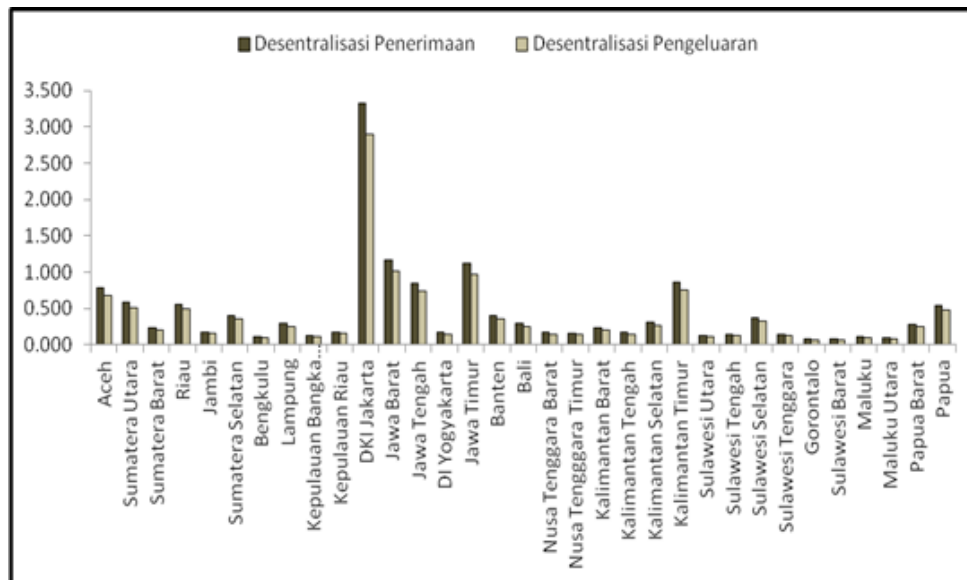
⁵⁸ Data inflasi dihitung menggunakan rumus berikut: $\pi_t = \left(\frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \right) \times 100$ dimana π_t adalah tingkat inflasi pada periode *t*.

daerah akan berimplikasi terhadap beragamnya nilai stabilitas makroekonomi tiap-tiap daerah di Indonesia.

Stabilitas makroekonomi, dalam tulisan ini diproksi oleh indeks MI, setiap provinsi di Indonesia pada tahun 2013 menunjukkan nilai yang bervariasi. Pada tahun 2013, indeks MI yang paling besar terjadi di Provinsi Banten yakni sekitar 17,59. Ini menunjukkan bahwa Provinsi Banten dibandingkan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia adalah

kewenangan secara lebih besar terhadap pemerintah provinsi untuk menjaga kestabilan makroekonominya di masing-masing daerahnya. Perkembangan desentralisasi fiskal di Indonesia pada tahun 2013, diproksi oleh desentralisasi penerimaan dan desentralisasi pengeluaran, dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Perkembangan Desentralisasi Fiskal di Indonesia Tahun 2013



provinsi di Indonesia yang memiliki ketidakstabilan makroekonomi yang paling tinggi. Artinya pada tahun 2013 Provinsi Banten memiliki tingkat pengangguran dan tingkat inflasi yang paling tinggi. Hal ini merupakan suatu ironi karena Provinsi Banten merupakan provinsi yang terletak di Pulau Jawa dimana wilayah Jawa merupakan pusat distribusi barang dengan rantai skala ritel yang luas sehingga mendorong harga yang kompetitif. Selain itu, infrastruktur di wilayah Jawa jauh lebih berkembang dan lebih berintegrasi dibandingkan wilayah luar Jawa.⁵⁹ Provinsi Banten juga merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang secara geografis dekat dengan pusat pemerintahan Indonesia, Jakarta, sehingga *trickle down effect* dari proses pembangunan di Jakarta harusnya lebih terasa untuk Provinsi Banten terutama masalah ketenagakerjaan. Provinsi Sulawesi Barat adalah provinsi dimana indeks MI-nya yang paling rendah, yaitu 3,76.

Beragamnya tingkat inflasi dan pengangguran di Indonesia membutuhkan suatu tindakan atau kebijakan untuk mengatasinya. *Policymaker* yang dapat mengetahui secara jelas faktor-faktor penyebab terjadinya inflasi dan pengangguran tersebut adalah pemerintah daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, desentralisasi fiskal yang sudah diterapkan di Indonesia diharapkan dapat memberikan

Desentralisasi fiskal yang sudah diterapkan di seluruh provinsi di Indonesia sejak tahun 2011, pada tahun 2013 menunjukkan nilai desentralisasi fiskal yang beragam. Tulisan ini menggunakan desentralisasi penerimaan dan desentralisasi pengeluaran untuk memproksi nilai desentralisasi fiskal. Desentralisasi penerimaan diproksi oleh rasio antara besarnya penerimaan setiap provinsi di Indonesia terhadap penerimaan negara. Penerimaan Pemerintah Provinsi meliputi pendapatan daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah mencakup pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan. PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah sedangkan dana perimbangan meliputi dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).

Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi di Indonesia yang memiliki penerimaan terbesar dibandingkan provinsi-provinsi lainnya. Rasio penerimaan Provinsi DKI Jakarta terhadap penerimaan negara mencapai angka 3,328 persen. Penerimaan Provinsi DKI Jakarta paling besar dibandingkan provinsi lainnya karena Provinsi DKI Jakarta memiliki pajak dan retribusi daerah yang paling besar. Pajak daerah dan retribusi daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2013 mencapai Rp

⁵⁹ Darius Tirtosuharto dan Handri Adiwilaga, *Op. Cit.*, hlm. 157.

23,37 triliun dan Rp 333,79 milyar dan total PAD-nya mencapai Rp 26,85 triliun. Untuk dana perimbangan, Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2013 hanya sebesar Rp 9,39 triliun.⁶⁰

Penerimaan terendah adalah Provinsi Gorontalo dimana nilai penerimaannya hanya sebesar 0,074 persen. Provinsi Gorontalo sangat mengandalkan dana yang berasal dari dana perimbangan. Pada tahun 2013, dana perimbangan Provinsi Gorontalo sebesar Rp 722,1 milyar sedangkan nilai PAD-nya hanya sebesar Rp 214,68 milyar meliputi pajak daerah sebesar Rp 200,88 milyar dan retribusi daerah sebesar Rp 571,21 juta.⁶¹

Desentralisasi fiskal, selain diproksi oleh desentralisasi penerimaan juga dapat diproksi oleh desentralisasi pengeluaran. Desentralisasi pengeluaran disini didefinisikan sebagai rasio antara pengeluaran pemerintah provinsi terhadap belanja nasional. Pengeluaran pemerintah provinsi meliputi belanja langsung, belanja tidak langsung dan pembiayaan daerah. Belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal sedangkan belanja tidak langsung mencakup belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan pengeluaran tidak terduga.

Pada tahun 2013, rasio pengeluaran pemerintah provinsi terhadap pengeluaran nasional adalah provinsi DKI Jakarta sebesar 2,985 persen. Pengeluaran tersebut meliputi belanja tidak langsung yang mencapai Rp 13,15 triliun, belanja langsung sebesar Rp 25,15 triliun dan pembiayaan daerah sebesar Rp 10,68 triliun. Rasio pengeluaran terendah adalah Provinsi Gorontalo yang hanya mencapai 0,065 persen. Angka tersebut meliputi belanja tidak langsung sebesar Rp 506,04 milyar, belanja langsung mencapai Rp 544,77 milyar dan pembiayaan daerah berada pada besaran Rp 102,84 milyar.⁶²

B. Peranan Desentralisasi Fiskal terhadap Stabilitas Makroekonomi

Untuk meneliti dampak desentralisasi fiskal terhadap stabilitas makroekonomi pada provinsi-provinsi di Indonesia, analisis data panel dibangun dalam penelitian ini dengan menggunakan data dari 33 provinsi pada selang periode 2009 – 2013. Pemilihan model panel data terbaik digunakan beberapa pengujian. Berdasarkan hasil *Chow test*, model panel data yang dipilih adalah *FE*. Hal ini bisa dilihat dari nilai probabilitas F dari estimasi *FE*

(Lampiran 3) sebesar 0,0025 atau lebih kecil dari alfa 5 persen. *LM test* menunjukkan bahwa nilai dari probabilitas F sebesar 0,0000 atau lebih kecil dari alfa 5 persen (Lampiran 6). Artinya model panel data RE yang dipilih. Karena, berdasarkan *Chow test* dan *LM test* model panel data *FE* dan *RE* yang dipilih maka digunakan *Hausman test* untuk memilih salah satu dari kedua model tersebut yang akan digunakan dalam penelitian ini. Hasil estimasi *Hausman test* menunjukkan bahwa nilai probabilitas F-nya sebesar 0,0042 atau lebih kecil dari alfa 5 persen (Lampiran 7). Jadi, model estimasi panel data *FE* akan digunakan dalam penelitian ini.

Hasil estimasi dengan menggunakan *FE* terhadap model empiris yang digunakan dalam tulisan ini, persamaan (5), diringkas pada Tabel 2 dan secara lebih lengkap tersaji dalam lampiran. Tabel 2 merupakan ringkasan dari berbagai hasil estimasi dimana variabel desentralisasi penerimaan dan desentralisasi pengeluaran diestimasi secara terpisah dengan stabilitas makroekonomi. Selain itu, variabel desentralisasi penerimaan dan desentralisasi pengeluaran juga diestimasi secara simultan. Dalam estimasi-estimasi tersebut, selain variabel-variabel desentralisasi fiskal juga dimasukkan beberapa variabel kontrol seperti tingkat pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi dari setiap provinsi di Indonesia.

Tabel 2. Hasil Estimasi Desentralisasi Fiskal dan Stabilitas Makroekonomi

Dep.Var: MI	Estimasi 1	Estimasi 2	Estimasi 3
DF ^R		1,651425***	1,422883
DF ^E	1,977248		0,3083158
PPK	-5,501859*	-5,550686*	-5,543277*
GROWTH	0,0003924	0,0007496	0,0007212
R ² Within	0,2167	0,2171	0,2171
Observasi	165	165	165

Keterangan: *1 persen, **5 persen, dan ***10 persen
 Sumber: data diolah STATA 11.0

Hasil estimasi yang disajikan pada Tabel 2 menjelaskan bagaimana hubungan antara variabel stabilitas makroekonomi dengan variabel-variabel desentralisasi fiskal dan variabel-variabel kontrol. Berdasarkan Tabel 2, ketika variabel desentralisasi pengeluaran diestimasi secara terpisah dan juga diestimasi secara bersamaan dengan variabel desentralisasi penerimaan, variabel-variabel ini bertanda positif tapi tidak signifikan mempengaruhi stabilitas makroekonomi. Akan tetapi, ketika variabel desentralisasi penerimaan diestimasi secara terpisah dengan variabel desentralisasi pengeluaran, estimasi 2, variabel desentralisasi penerimaan berpengaruh

⁶⁰ Badan Pusat Statistik, *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2010 – 2013*, Jakarta: BPS, 2013, hlm. 40.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Badan Pusat Statistik, *Op.Cit.*, hlm. 40.

positif terhadap stabilitas makroekonomi dan signifikan pada tingkat kepercayaan 10 persen. Tanda positif dan signifikan dalam estimasi 2 tersebut mendukung studi-studi empiris yang dilakukan sebelumnya seperti studi Prud'homme tahun 1995, Fornasari, Webb dan Zou tahun 2000, Martinez-Vazquez dan McNab tahun 2006, King dan Ma tahun 2001, Neyapti tahun 2004, Martinez-Vazquez dan McNab tahun 2006 dan Tirtosuharto dan Adiwilaga tahun 2013 yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal berdampak positif terhadap stabilitas makroekonomi. Tetapi, studi ini berlawanan dengan hasil studi yang dilakukan oleh Iqbal dan Nawaz tahun 2010. Studi Iqbal dan Nawaz tahun 2010 juga menggunakan proksi indeks MI untuk variabel stabilitas makroekonomi.

Tanda positif hubungan antara desentralisasi fiskal dan stabilitas makroekonomi mengindikasikan bahwa rasio penerimaan dan pengeluaran daerah terhadap penerimaan dan belanja negara yang lebih tinggi berkaitan dengan tingginya indeks MI. Indeks MI yang tinggi menunjukkan tingkat pengangguran dan tingkat inflasi yang tinggi juga. Atau dengan kata lain tingkat stabilitas makroekonominya rendah. Hal ini mengimplikasikan bahwa pemberian kekuasaan yang lebih dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan otoritas untuk menggunakan seluruh kekayaan dan sumber daya di dalam wilayahnya masing-masing mungkin tidak sepenuhnya memberikan dampak positif dalam menjaga stabilitas makroekonomi di daerah.⁶³ Karena diduga pemerintah provinsi dan pemerintah tingkat lokal, walaupun mempunyai informasi dan pengetahuan lebih lengkap tentang daerahnya, akan tetapi tidak dapat menggunakannya secara lebih tepat.

Berdasarkan literatur, besarnya kontribusi pengeluaran pemerintah (tingkat desentralisasi fiskal yang lebih tinggi) berpotensi menyebabkan inflasi yang lebih tinggi (stabilitas makroekonomi yang rendah), khususnya ketika pengeluaran ditujukan untuk program-program dan aktivitas yang tidak produktif. Hal ini bisa dilihat dari standar hidup masyarakat yang mengalami penurunan karena meningkatnya harga-harga dan menurunnya daya beli masyarakat.⁶⁴ Artinya pengeluaran daerah tersebut tidak efisien sehingga dapat meningkatkan inflasi karena berpotensi meningkatkan laju pertumbuhan uang beredar.⁶⁵ Selain itu, pengeluaran yang sia-sia juga berpotensi membuat kegiatan yang tidak dapat menyerap tenaga kerja. Hal ini berimplikasi terhadap banyaknya tenaga kerja yang tidak dapat mendapatkan kesempatan kerja alias meningkatnya

tingkat pengangguran. Tingginya tingkat inflasi dan tingkat pengangguran menyebabkan stabilitas makroekonomi yang rendah (indeks MI yang tinggi).

Tidak signifikannya dampak dari desentralisasi fiskal terhadap stabilitas makroekonomi mendukung hasil studi King dan Ma (2001) dan Neyapti (2004). Secara bersama-sama, variabel desentralisasi penerimaan dan desentralisasi pengeluaran tidak berdampak signifikan terhadap stabilitas makroekonomi memberikan indikasi bahwa hubungan antara desentralisasi fiskal dan stabilitas makroekonomi tidak menunjukkan bukti hubungan yang kuat. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, jika kepentingan lokal yang kuat maka desentralisasi, tanpa adanya akuntabilitas lokal, dapat meningkatkan korupsi dan fragmentasi sosial. *Kedua*, kapasitas kelembagaan dan administrasi dari pemerintah daerah yang kurang dapat menghambat terciptanya manfaat dari desentralisasi fiskal itu sendiri. *Ketiga*, desentralisasi fiskal mungkin menciptakan kompetisi dan ketegangan antara pemerintah daerah. *Keempat*, masalah koordinasi antar tingkat pemerintahan yang berbeda dapat menghambat reformasi fiskal dan pelaksanaan penyesuaian makroekonomi.⁶⁶ Selain itu, tidak signifikannya dampak dari desentralisasi fiskal terhadap stabilitas makroekonomi karena (1) tidak tepatnya penempatan pengeluaran, (2) tidak tepatnya penempatan pajak atau penerimaan, dan (3) desain yang efisien dari sistem transfer dan pengimplementasian yang tidak tepat.

Hasil estimasi yang disajikan pada Tabel 2 juga memperlihatkan bagaimana peranan variabel kontrol terhadap stabilitas makroekonomi. Hasil estimasi menunjukkan bahwa pendapatan per kapita berpengaruh negatif dan signifikan (pada tingkat kepercayaan 1 persen) terhadap stabilitas makroekonomi. Temuan ini mendukung hasil studi Treisman tahun 2000 dan Baskaran tahun 2011 yang menemukan bahwa daerah dengan tingkat pendapatan per kapita yang tinggi berkaitan erat dengan stabilitas makroekonomi yang tinggi (dalam hal ini tingkat inflasi yang rendah). Di lain pihak, pertumbuhan ekonomi daerah ditemui tidak berperan secara signifikan terhadap penciptaan stabilitas makroekonomi.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Tulisan tentang pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal terhadap stabilitas makroekonomi belum mendapatkan hasil yang konklusif tentang keuntungan dari desentralisasi

⁶³ Darius Tirtosuharto dan Handri Adiwilaga, *Op. Cit.*, hlm. 155.

⁶⁴ Ika, Syahrir, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 18.

⁶⁵ Darius Tirtosuharto dan Handri Adiwilaga, *Op. Cit.*, hlm. 155.

⁶⁶ Nasir Iqbal dan Saima Nawaz, *Op. Cit.*, hlm. 14.

fiskal. Tulisan ini dilakukan dengan menggunakan data dari 33 provinsi di Indonesia dimana estimasi yang digunakan adalah metode estimasi panel *fixed*. Tulisan ini merupakan tulisan pertama yang dilakukan di Indonesia menggunakan proksi indeks MI untuk variabel stabilitas makroekonomi pada level provinsi.

Stabilitas makroekonomi tiap provinsi di Indonesia menunjukkan nilai yang bervariasi. Pada tahun 2013, indeks MI paling besar adalah Provinsi Banten sedangkan indeks MI paling rendah adalah Provinsi Sulawesi Barat. Artinya Provinsi Banten adalah provinsi yang memiliki ketidakstabilan makroekonomi yang paling tinggi sedangkan tingkat kestabilan makroekonomi yang tinggi terjadi di Provinsi Sulawesi Barat.

Studi ini juga menemukan bahwa desentralisasi fiskal, dalam tulisan ini diproksi oleh desentralisasi penerimaan dan desentralisasi pengeluaran, berdampak positif terhadap stabilitas makroekonomi ketika dua variabel desentralisasi tersebut diestimasi secara bersama-sama tapi tidak signifikan. Akan tetapi, ketika diestimasi secara terpisah kedua variabel tersebut mempunyai pengaruh yang berbeda. Peranan desentralisasi pengeluaran terhadap stabilitas makroekonomi adalah tidak signifikan, sebaliknya desentralisasi penerimaan mempunyai pengaruh yang signifikan. Indikasi ini menunjukkan bahwa hubungan antara desentralisasi fiskal dan stabilitas makroekonomi tidak menunjukkan hubungan yang kuat.

B. Saran

Stabilitas makroekonomi tiap-tiap provinsi di Indonesia yang bervariasi memerlukan koordinasi antar daerah yang kuat dalam hal pengendalian inflasi, begitu juga koordinasi dengan pemerintah pusat. Dalam hal pengendalian tingkat pengangguran di masing-masing daerah, penciptaan pengeluaran yang efektif akan dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Penelitian yang diangkat dalam tulisan ini memiliki keterbatasan. Salah satunya proksi untuk variabel desentralisasi fiskal dan stabilitas makroekonomi. Kemungkinan ada proksi yang lebih baik untuk variabel desentralisasi fiskal. Selain itu, indeks yang digunakan untuk stabilitas makroekonomi yaitu MI, sangat dimungkinkan untuk diubah formulanya. Perubahan ini diharapkan dapat memperoleh indeks komposit stabilitas makroekonomi yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Kumorotomo, Wahyu. (2008). *Desentralisasi Fiskal: Politik dan Perubahan Kebijakan 1974-2004*. Jakarta: Kencana.
- Kuncoro, Mudrajad. (2010). *Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Priyarsono, D.S. (2011). *Dari Pertanian ke Industri: Analisis Pembangunan dalam Perspektif Ekonomi Regional*. Bogor: IPB Press.
- Rahayu, A. Sri. (2010). *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Saragih, J. Panglima. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sjafrizal. (2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: Rajawali Press.

Buku kumpulan artikel:

- Ika, Syahrir, dkk. (2013). *Risiko Fiskal Daerah: Menjaga Kesehatan Fiskal dan Kesenambungan Pembangunan Cetakan Kedua*. Solo: Era Adicitra Intermedia.

Artikel dalam jurnal:

- Baskaran, T. (2011). Revenue Decentralization and Inflation: A Re-Evaluation, *MPRA paper No. 36911*.
- Bodman, P., Campbell, H., Heaton, K.A., dan Hodge, A. (2009). Fiscal Decentralization, Macroeconomic Conditions and Economic Growth in Australia, *Macroeconomics Research Group, ISSN 1833-4474*.
- Faridi, M. Zahir. (2011). Contribution of Fiscal Decentralization to Economic Growth: Evidence from Pakistan, *Pakistan Journal of Social Sciences*, Vol. 31, No. 1.
- Feltenstein, A. dan Iwata, S. (2005). Decentralization and Macroeconomic Performance in China: Regional Autonomy has Its Costs, *Journal of Development Economics* 76, 2005.
- Iqbal, N., Din, M. ud, dan Ghani, Ejaz. (2013). Fiscal Decentralization and Economic Growth: Role of Democratic Institutions, *Pakistan Institute of Development Economics (PIDE) Working Papers*, Vol. 89.

- Iqbal, Nasir dan Nawaz, Saima. (2010). Fiscal Decentralization and Macroeconomic Stability: Theory and Evidence from Pakistan, *MPRA paper*, No. 27184.
- Jalil, A.Z.A., Harun, M., dan Mat, S.H.C. (2012). Macroeconomic Instability and Fiscal Decentralization: An Empirical Analysis, *Prague Economic Papers*, 2.
- King, D. dan Ma, Y. (2001). Fiscal Decentralization, Central Bank Independence, and Inflation, *Economic Letters* 72.
- Malik, S., Hass, M. dan Hussain, S. (2006). Fiscal Decentralization and Economic Growth in Pakistan, *The Pakistan Development Review*, Vol. 45(4).
- Martinez-Vazquez, J. dan Macnab, R.M. (2006). Fiscal Decentralization, Macrostability and Growth, *Hacienda Publica Espanola/Revista de Economia Publica*, Vol. 179(4).
- Neyapti, B. (2004). Fiscal Decentralization, Central Bank Independence, and Inflation: A Panel Investigation, *Economics Letters* 82.
- Prud'homme, R. (1995). On The Dangers of Decentralization, *The World Bank Policy Research Working Paper*, 1252.
- Samimi, A. Jafari, Petanlar, S. Karimi, Haddad, G. Keshavarz dan Alizadeh, Mohammad. (2010). Fiscal Decentralization and Economic Growth: A Nonlinear Model for Provinces of Iran, *Iranian Economic Review*, Vol. 15, No. 26.
- Shah, A. (2006). Fiscal Decentralization and Macroeconomic Management, *International Tax Public Finance*, Vol. 13.
- Thornton, John. (2007a). Fiscal Decentralization and Economic Growth Reconsidered, *Journal of Urban Economic* 61.
- Thornton, John. (2007b). Further Evidence on Revenue Decentralization and Inflation, *Economics Letters* 95.
- Tirtosuharto, D. dan Adiwilaga, H. (2013). Decentralization and Regional Inflation in Indonesia, *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Vol. 16 No. 2.
- Treisman, D. (2000). Decentralization and Inflation: Commitment, Collective Action, or Continuity, *American Political Science Review*, Vol. 94 (4).
- Dokumen Resmi:**
- Badan Pusat Statistik. (2010). *Statistik Indonesia 2010*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2011). *Statistik Indonesia 2011*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2012). *Statistik Indonesia 2012*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2013a). *Statistik Indonesia 2013*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2013b). *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2009 – 2012*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2013c). *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2010 – 2013*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2014a). *Statistik Indonesia 2014*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2014b). *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2011 – 2014*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2012 – 2015*. Jakarta: BPS.
- Buku Terjemahan:**
- Gujarati, Damodar N. dan Porter, Dawn C. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika*, Buku 2, terjemahan oleh Raden Carlos Mangunsong. Jakarta: Salemba Empat.
- Internet:**
- Mifda. (2011). Percepatan Pembangunan dengan Desentralisasi Fiskal, (*online*), (http://www.kompasiana.com/mifda/percepatan-pembangunan-dengan-desentralisasi-fiskal_550df242a33311a22dba7e61, diunduh 12 Januari 2015).

LAMPIRAN

Lampiran 1. Estimasi *Pooled Least Squares*

```
. reg mi dfe dfr growth ppk
```

Source	SS	df	MS			
Model	169.964504	4	42.4911259	Number of obs =	165	
Residual	1105.93083	160	6.91206769	F(4, 160) =	6.15	
Total	1275.89533	164	7.77984959	Prob > F =	0.0001	
				R-squared =	0.1332	
				Adj R-squared =	0.1115	
				Root MSE =	2.6291	

mi	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
dfe	5.569046	10.10398	0.55	0.582	-14.38533	25.52342
dfr	-3.18587	9.203623	-0.35	0.730	-21.36212	14.99038
growth	-.0397662	.0554356	-0.72	0.474	-.1492459	.0697136
ppk	-.0269713	.8484599	-0.03	0.975	-1.702596	1.648654
_cons	11.27226	3.625783	3.11	0.002	4.111694	18.43282

.

Lampiran 2. Estimasi *Random Effect*

```
. xtreg mi dfe dfr growth ppk, re
```

Random-effects GLS regression	Number of obs =	165
Group variable: provinsi	Number of groups =	33
R-sq: within = 0.2108	obs per group: min =	5
between = 0.0451	avg =	5.0
overall = 0.0675	max =	5
Random effects u_i ~ Gaussian	wald chi2(4) =	29.18
corr(u_i, X) = 0 (assumed)	Prob > chi2 =	0.0000

mi	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
dfe	3.528456	5.941461	0.59	0.553	-8.116593	15.17351
dfr	-.3137896	5.346732	-0.06	0.953	-10.79319	10.16561
growth	-.0078772	.0428489	-0.18	0.854	-.0918595	.0761051
ppk	-3.98821	.867959	-4.59	0.000	-5.689378	-2.287042
_cons	28.10085	3.751372	7.49	0.000	20.7483	35.4534

sigma_u	2.1810965	
sigma_e	1.4794276	
rho	.68489183	(fraction of variance due to u_i)

.

Lampiran 3. Estimasi *Fixed Effect*

```
. xtreg mi dfe dfr growth ppk, fe ro
```

Fixed-effects (within) regression
Group variable: provinsi

Number of obs - 165
Number of groups - 33

R-sq: within - 0.2171
between - 0.0154
overall - 0.0012

Obs per group: min - 5
avg - 5.0
max - 5

corr(u_i, Xb) - -0.4551

F(4, 32) - 5.17
Prob > F - 0.0025

(Std. Err. adjusted for 33 clusters in provinsi)

mi	Coef.	Robust Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
dfe	.3083158	4.269745	0.07	0.943	-8.388869	9.005501
dfr	1.422883	2.906479	0.49	0.628	-4.497422	7.343187
growth	.0007212	.0248177	0.03	0.977	-.0498309	.0512732
ppk	-5.543277	1.277376	-4.34	0.000	-8.145207	-2.941348
_cons	35.40307	5.651866	6.26	0.000	23.8906	46.91555
sigma_u	2.7994484					
sigma_e	1.4794276					
rho	.78168865	(fraction of variance due to u_i)				

Lampiran 4. Estimasi *Fixed Effect* Alternatif 1

```
. xtreg mi dfe growth ppk, fe ro
```

Fixed-effects (within) regression
Group variable: provinsi

Number of obs - 165
Number of groups - 33

R-sq: within - 0.2167
between - 0.0105
overall - 0.0025

Obs per group: min - 5
avg - 5.0
max - 5

corr(u_i, Xb) - -0.4417

F(3, 32) - 6.94
Prob > F - 0.0010

(Std. Err. adjusted for 33 clusters in provinsi)

mi	Coef.	Robust Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
dfe	1.977248	1.375297	1.44	0.160	-.8241417	4.778637
growth	.0003924	.0254832	0.02	0.988	-.0515152	.0522999
ppk	-5.501859	1.245405	-4.42	0.000	-8.038665	-2.965053
_cons	35.18125	5.467014	6.44	0.000	24.0453	46.31719
sigma_u	2.7758158					
sigma_e	1.4740966					
rho	.78002272	(fraction of variance due to u_i)				

Lampiran 5. Estimasi *Fixed Effect* Alternatif 2

```
. xtreg mi dfr growth ppk, fe ro
Fixed-effects (within) regression          Number of obs   -   165
Group variable: provinsi                  Number of groups -   33

R-sq:  within - 0.2171                    Obs per group:  min -   5
        between - 0.0182                    avg             -  5.0
        overall - 0.0007                    max             -   5

corr(u_i, Xb) - -0.4611                    F(3, 32)        -   6.80
                                                Prob > F         -   0.0011

(Std. Err. adjusted for 33 clusters in provinsi)
```

mi	Coef.	Robust Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
dfr	1.651425	.8775095	1.88	0.069	-.1360032	3.438853
growth	.0007496	.0245962	0.03	0.976	-.0493513	.0508505
ppk	-5.550686	1.251679	-4.43	0.000	-8.100272	-3.0011
_cons	35.45761	5.435118	6.52	0.000	24.38664	46.52858
sigma_u	2.8100109					
sigma_e	1.4736945					
rho	.78428793	(fraction of variance due to u_i)				

Lampiran 6. Estimasi Breusch and Pagan Lagrangian Multiplier (LM) Test

```
. xttest0
Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects
mi[provinsi,t] = xb + u[provinsi] + e[provinsi,t]
Estimated results:
-----+-----+-----
mi |          7.77985          2.789238
e  |          2.188706          1.479428
u  |          4.757182          2.181097
-----+-----+-----
Test:  Var(u) = 0
              chi2(1) = 119.38
              Prob > chi2 = 0.0000
```

Lampiran 7. Estimasi Hausman Test

```
. hausman fe re
-----+-----+-----+-----+-----
|          coefficients          |          |          |          |
| (b)          (B)          | (b-B)   | sqrt(diag(v_b-v_B)) |
| fe          re          | Difference | S.E.          |
-----+-----+-----+-----+-----
dfe | .3083158 | 3.528456 | -3.220141 | 3.033806 |
dfr | 1.422883 | -.3137896 | 1.736672 | .          |
growth | .0007212 | -.0078772 | .0085984 | .0070481 |
ppk | -5.543277 | -3.98821 | -1.555067 | .4125133 |
-----+-----+-----+-----+-----
b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg
Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic
              chi2(4) = (b-B)'[(v_b-v_B)^(-1)](b-B)
              = 15.26
              Prob>chi2 = 0.0042
              (V_b-v_B is not positive definite)
```